

# MEDIA INDONESIA

BAWA SUARA RAKYAT

**HOTLINE**

Berlangganan & Customer Service

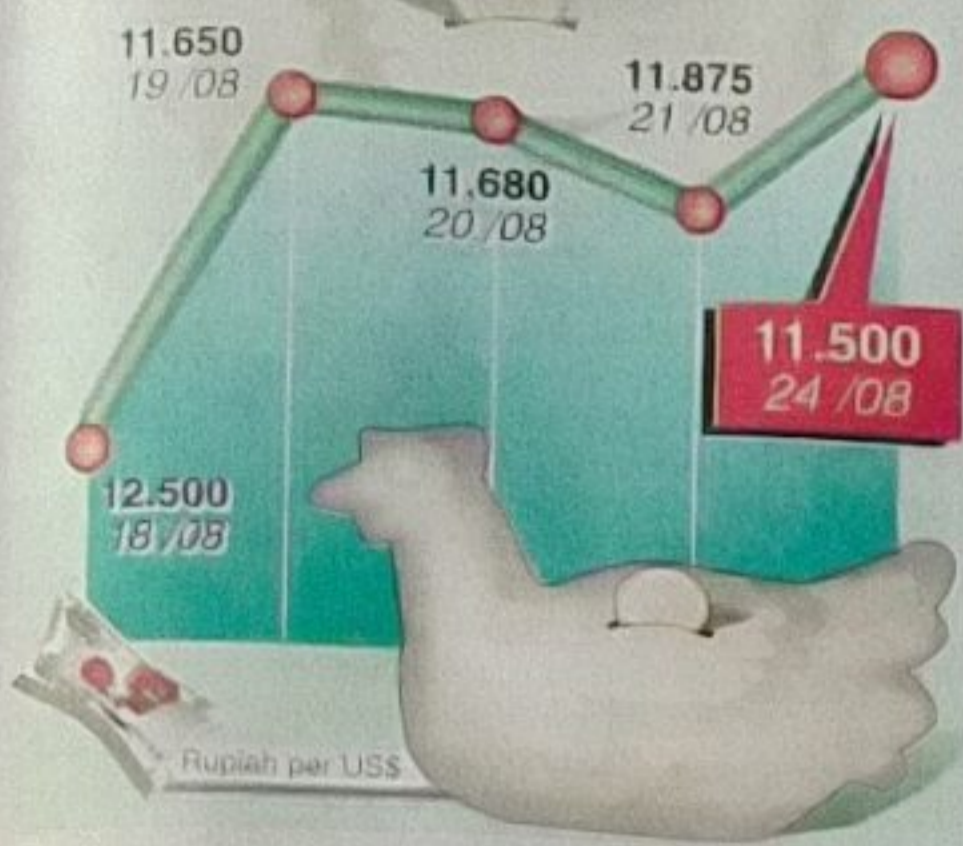
Telp/Fax: (021) 582-1303

http://www.mediaindo.co.id/

SELASA, 25 AGUSTUS 1998  
NO. 6561 TAHUN XXIX  
16 HALAMAN  
Harga Eceran di P. Jawa:  
Rp 1.500,-

## NAPSHOT

### FLUKTUASI RUPIAH di pasar valas Jakarta



## EDITORIAL

### Vonis tanpa Pengungkapan

TERUNGKAP sudah hukuman yang dijatuhkan kepada tiga petinggi Kopassus yang terlibat penculikan para aktivis. Setelah menerima rekomendasi dan kesimpulan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang bekerja hampir satu bulan, Pangab Jenderal Wiranto akhirnya menjatuhkan sanksi yang berbeda.

Letjen Prabowo Subianto yang menjadi tokoh sentral dalam drama dan tragedi penculikan diakhir masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dalam terminologi sipil yang tidak disulit-sulitkan seperti di militer, Prabowo kita anggap dipecat. Sedangkan Mayjen TNI Muchdi PR dan Kolonel Chairawan dibebaskan dari semua tugas dan jabatan struktural ABRI. Singkat kata, pimpinan ABRI memilih hukuman administratif kelimbang hukuman pengadilan.

Pangab memang tidak menutup kemungkinan ketiga perwira ABRI ini di-Mahmil-kan kalau pemeriksaan terhadap 10 terdakwa anggota Kopassus lainnya mengharuskan hal itu. Akan tetapi kita sudah mahfum apa arti sebuah janji bersyarat seperti itu.

Penculikan para aktivis kita anggap sebagai skandal yang memalukan. Akan tetapi, karena pelakunya adalah militer, mengungkapkannya ditempuh melalui cara-cara khusus dengan lembaga super-khusus. Dan, hasilnya harus dimengerti dengan nalar-nalar khusus pula.

Naluri dan rasa keadilan publik melihat bahwa penculikan terhadap aktivis adalah kejahatan biasa. Yang menjadi unik dan rumit—dan ini menjadi tantangan penegakan hukum—karena pelakunya adalah orang-orang yang oleh negara diberi hak menggunakan senjata.

Sebagaimana layaknya sebuah skandal publik sangat haus untuk mengetahui liku-liku kejadiannya. Tetapi kehausan itu tidak memuaskan selera keadilan publik. Karena, yang diunggulkan tidak memberi peluang kepada publik untuk mengetahui secara tuntas latar belakang penculikan. Terutama, siapakah yang memberi perintah kepada Prabowo melakukan operasi politik yang mengganggang hak asasi warga?

Dengan memecat Prabowo, ABRI ingin memperlihatkan bahwa dalam tubuh organisasi ini berlaku *punishment and reward*. Akan tetapi dalam kasus Prabowo justru hukuman itu tidak memuaskan selera keadilan publik. Karena, yang diunggulkan bukan hanya bagaimana dan apa hukuman terhadap Prabowo, tetapi pemenuhan *the right to know*. Rakyat berhak tahu segala informasi yang berkaitan dengan penculikan. Dua tuntutan itu, hukuman dan hak publik atas informasi, adalah: kelengkapan hakiki dari sebuah keadilan.

ABRI rupanya masih kaku dengan persepsinya sendiri—bukan persepsi publik—tentang keadilan dan kejahatan. ABRI merasa rakyat hanya cukup diberi tahu tentang sanksi tanpa perlu mengerti seluk-beluknya. Eksklusivisme maka seperti ini biasanya berekses pada pemaksaan dan pembohohan.

Jadi, hukuman terhadap Prabowo, Muchdi, dan Chairawan tidak mengungkap apa-apa. ABRI rupanya tidak ingin menelan pil yang terlalu pahit. ▲

## NDEKS

**SOAL BBO:** Berita bagus untuk para karyawan tiga BBO. Pesangon lebih besar dan pekerjaan baru menanti Anda.

**Multi Partai dan Pemilu**

Dalam tiga bulan terakhir ini partai-partai baru bermunculan, bak jamur di musim hujan. Dan semuanya lahir di era reformasi. Tapi, bagaimana nasib reformasi itu sendiri?

**POLITIK KREMLIN:** Kejutan demi kejutan mencuat dari Kremlin. Pencetusnya? Siapa lagi kalau bukan Presiden Boris Yeltsin. Kejutan pertama adalah pemecatan PM Sergei Kiriyenko. Dan, yang paling terkejut dengan peristiwa tersebut adalah Viktor Chermomyrdin. Tokoh yang ditendang dari kursi PM lima bulan lalu ini diminta balik lagi. Namun sayap kiri siap menghadangnya.



**YA ATAU TIDAK:** Ini kabar gajil dari Malang. Seorang dosen dan enam karyawan APP diinterogasi selama 12 jam, dan mereka hanya boleh menjawab ya atau tidak.



## Ketua F-PP: Sanksi itu tak Cerminkan Rasa Keadilan

JAKARTA (Media): Kalangan DPR, praktisi hukum maupun Kontra belum puas dengan keputusan Mahkamah Pangab Jenderal TNI Wiranto yang hanya memberi sanksi administratif kepada Letjen TNI Prabowo Subianto, Mayjen TNI Muchdi PR, dan Kolonel Inf Chairawan berkaitan dengan kasus penculikan sejumlah aktivis prodemokrasi beberapa waktu lalu.

Mereka yang diwawancarai adalah Ketua F-PP DPR Zarkasih Nur, Sekretaris F-PP DPR Bachtiar Chamsyah, dan Koordinator Kontra Murni. Sedangkan Wakil Ketua F-PP DPR bidang Umum Chaerudin Harahap, Prof. Sutandyo, dan Letjen TNI Soeyono menilai putusan tersebut sudah maksimal dan terbaik bagi ABRI.

Mereka mengemukakan pendapatnya secara terpisah namun menanggapi keputusan Pangab terhadap tiga petinggi pasukan elite TNI-AD Kopassus dalam kasus penculikan para aktivis. Kemudian, Pangab Jenderal TNI Wiranto memberi sanksi mengakhiri masa dinas Letjen TNI Prabowo dalam jajaran ABRI. Sementara Mayjen TNI Muchdi dan Kol Chairawan dibebaskan dari semua tugas dan jabatan struktural ABRI.

Ketua F-PP DPR RI Zarkasih Nur mengatakan putusan tersebut sama sekali tidak tuntas dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Putusan baru dipandang adil jika kasus tersebut dibawa ke Mahkamah Militer.

"Kalau sekadar seperti ini pasti masyarakat tidak puas. Karena itu putusan seperti kasus harus tuntas agar tidak menimbulkan tanda tanya baru lagi," kata Zarkasih Nur.

Menurut dia, jika kesalahan Prabowo tersebut secara militer tidak bisa dibawa ke Mahkamah Militer, maka para korban penculikan maupun keluarga korban dapat membawa Prabowo ke pengadilan negeri dan memperkerakannya baik secara pidana maupun perdata.

Sedangkan Sekretaris F-PP DPR Bachtiar Chamsyah menyatakan kegelisahan terhadap keputusan Pangab tersebut. Terlebih, dari berat ringannya hukuman itu, yang pasti, masyarakat tidak puas.

Menurut Bachtiar, sejak semula F-PP menginginkan agar kasus penculikan yang melibatkan satuan elite TNI-AD ini digelar ke pengadilan militer atau Mahkamah Militer. Keinginan F-PP ini semata-mata agar masalahnya menjadi transparan dan menyatukan kubu Soerjadi dan Megawati. "Saya sangat mengkhawatirkan masalah mereka dapat diselesaikan di Palu. Kalau konflik itu dibawa terus saya tidak tahu PDI akan menjadi apa, tentu gambar PDI akan ada berapa," katanya.

Ketika ditanyakan mengapa pemerintah tidak bersedia mengakui kepemimpinan DPP PDI Megawati yang sah dan konstitusional, Mendagri menegaskan, "pemerintah itu tidak akan menyelesaikan persoalan."

Kongres hari ini berlangsung dalam situasi menegakan. Kendati 1.300 personel aparat keamanan distagakan, massa pendukung Megawati masih berupaya untuk menggagalkan kongres. Kemudian, ribuan pendukung Megawati melakukan *long march* menuju tempat kongres di Wisma Haji Palu, menuntut agar Soerjadi membatalkan kongres.

Long march dimulai dari tempat dihirup oleh para pendukung perintis dari Polres Donggala ketika akan memasuki pasar perbatasan di Jl Hasanudin dan Gedah Mbak, tetapi tidak sampai sampai bentakan dengan aparat keamanan.

Mereka menggalang spanduk bertuliskan "Bubarkan Kongres traktat PDI Soerjadi, Wisma Haji bukan tempat bagi petaka-petaka Soerjadi bertubuh".

Pendukung Megawati dibentarkan memasuki tempat di Wisma Haji Palu pukul 12.30 Wita. Operasi pengaman yang berkecamuk dan

## Karier Militer Prabowo Tamat

### ■ Dia Menculik Sembilan Aktivis

JAKARTA (Media): Letjen TNI Prabowo Subianto diberhentikan dari jajaran ABRI menyusul keputusan Pangab Jenderal TNI Wiranto yang mengakhiri masa dinas jenderal berbintang tiga itu. Sedangkan Mayjen TNI Muchdi dan Kol Chairawan dibebaskan dari semua tugas dan jabatan struktural dalam ABRI.

Keputusan Pangab Jenderal TNI Wiranto itu dibacakan kemarin dalam sebuah konferensi pers setelah Pangab mendapat rekomendasi dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Sebelumnya DKP telah memeriksa ketiga petinggi pasukan elite TNI-AD Kopassus masing-masing mantan Danjen Kopassus Letjen TNI Prabowo, Mayjen TNI Muchdi PR, dan mantan Dan Grup IV Kol Inf Chairawan berkaitan dengan kasus penculikan terhadap sejumlah aktivis prodemokrasi.

Ketika membacakan keputusan tersebut Jenderal Wiranto didampingi Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo yang juga KSAD serta semua anggota DKP lainnya yakni Letjen TNI Fachrud Razi (Kasum ABRI), Letjen TNI Agum Gumelar (Gubernur Lampung), Laksya TNI Soeramin (Ijen ABRI), Letjen TNI Djamar, Chaniago (Pangkostrad), Letjen

TNI Yusuf Kartanegara (Ijen Dephankam), Letjen TNI Sosisio Bambang Yudhoyono (Kasspol ABRD), Laksya TNI Achmad Sutijto (Komandan Jenderal/Danjen Akabri, serta Letjen TNI Sugiono (Wakasad).

Menurut Pangab, alasan dijatuhkannya sanksi tersebut karena ketiga perwira itu terbukti terlibat dalam kasus penculikan sejumlah aktivis LSM dan pelanggaran HAM beberapa waktu yang lalu.

Ketua DKP Jenderal TNI Subagyo HS mengatakan, Letjen TNI Prabowo yang terakhir menjabat sebagai Dan Sesko ABRI itu mengukuhkan telah memberikan perintah menculik sembilan aktivis dan semuanya sudah dibebaskan.

Mengenai nasib 12 aktivis lagi yang sampai sekarang belum ditemukan dan belum diketahui apakah masih hidup atau sudah mati, Subagyo mengakui tidak tahu. "Yang 12 itu kita tidak tahu siapa yang menculik. Kasusnya sedang diselidiki Puspopin ABRI," tegas Subagyo.

Jenderal Wiranto menjelaskan, hukuman yang dijatuhkan kepada tiga petinggi Kopassus itu adalah sanksi administratif. Namun, lanjut jenderal berbintang empat itu, kendati ketiga perwira terdakwa telah mendapatkan sanksi administratif, tidak tertutup kemungkinan dibawa ke Mahkamah Militer.

Menurut Wiranto, sanksi administratif itu merupakan keputusan optimal yang bisa dia ambil dalam kapasitas sebagai Pangab. Sebab menurut dia, DKP tidak berwenang memberikan rekomendasi yang bersifat pidana.

Wiranto menjelaskan pihaknya melihat dari sisi kesalahan yang dibuat dan sebagainya mereka selama aktif berdinast pada bangsa dan negara. "Perlu juga saya tegaskan bahwa keputusan yang diambil ini tidak berada dalam tekanan siapa pun. Ini perlu saya tegaskan untuk mencegah timbulnya spekulasi yang macam-macam," ujarnya.

"Jadi kapan Prabowo es dimahmilkan," kejar wartawan.

Menjawab pertanyaan itu, Wiranto mengatakan ketiganya akan dirubuhkan jika 10 anggota terdakwa oleh Mahmil itu akan memberikan keterangan yang bisa dikembangkan apakah Prabowo, Muchdi, dan Chairawan melakukan kesalahan pidana militer atau tidak," katanya.

Usar membacakan keputusan, Wiranto dengan tim DKP bergesah mengesahkan tempat, namun pers terus memburu. "Apa pengertian dari diakhir dinasnya di ABRI?" tanya wartawan.

"Pengertiannya dia sudah menjadi sipil dan tidak lagi menjabat struktural di ABRI, tetapi dipensiunkan. Inilah hukumannya seperti itu," kata Wiranto.

"Lalu bagaimana dengan hak pensiunnya," kejar wartawan.

Menurut Wiranto, Prabowo akan mendapatkan hak pensiun penuh.

"Kalau Mayjen Muchdi dan Kolonel Chairawan?" tanya wartawan lagi.

"Muchdi dan Chairawan masih tetap berdinast di ABRI tetapi tidak diberi jabatan," kata Wiranto.

Subagyo mengatakan, diakhirnya dua aktivis Prabowo berarti pensiunnya diproses dengan hormat dan tanggal meninggal SK dari Pangab. (Edi/W.B/D-12)

## Grup Salim Jual Usahanya di LN

### ■ Untuk Bayar Bantuan Likuiditas kepada Pemerintah

JAKARTA (Media): Kelompok usaha Salim mengaku telah menjual sejumlah perusahaannya di luar negeri guna mengembalikan kewajiban BCA kepada pemerintah. Pemerintah sendiri akan mencairkan hingga ke luar negeri harta pemilik bank yang mendapat bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang totalnya mencapai Rp 135 triliun.

Sudwikatmono, Presid PT Indocement (salah satu aset pemilik BCA yang akan diambil alih pemerintah) mengungkapkan pihaknya telah menjual beberapa perusahaan Grup Salim di luar negeri untuk membayar kewajiban BCA kepada pemerintah. Pemerintah memberi batas waktu pengembalian bantuan likuiditas itu hingga 21 September.

Saat ini 75% kewajiban BCA telah dibayarkan ke BPPN, sedangkan sisanya dalam waktu sebulan akan segera kita atasi," tandas Sudwikatmono kepada wartawan di sela-sela perseremoni Institut Semen dan Beton Indonesia di Gunung Putri Bogor, kemarin.

Menurut Sudwikatmono, seluruh kewajiban BCA yang harus dipertanggungjawabkan kepada BPPN mencapai Rp 30 triliun. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tersebut telah dikembalikan sebesar Rp 27 triliun, sedangkan kekurangannya dalam waktu dekat segera diselesaikan.

"Kita sudah bayar Rp 27 triliun kepada BPPN dan dalam waktu dekat sekitar Rp 2 triliun yang merupakan hasil penjualan aset di luar negeri akan segera diserahkan. Sedangkan Rp 1 triliun sisanya sedang diupayakan," ungkap Sudwikatmono tanpa menyebut pengembalian BLBI tersebut dalam bentuk aset atau dana tunai.

Meski tidak menyebut secara rinci, dia mengaku perusahaan yang dijual adalah yang berlokasi di Hong Kong dan Belanda (lihat di-

bagi di dalam dan di luar negeri) sebagai bantuan pemerintah itu kembali. Kita ingin selamatkan dana itu dan langkah ini dilakukan berdasarkan aturan," ujar Menko Ekan Gusmanudin Kartasasmita diiringi gemuruh tepak tangan peserta Muktamar Gabungan Petalokom Komunitas Indonesia (Gapeks) di Jakarta, kemarin.

Gusmanudin menegaskan bahwa langkah pemerintah menggerakkan aset pemilik bank untuk membayar BLBI dapat kontrol secara langsung di tangan pemerintah. Aset BCA yang akan dijual pemerintah antara lain Indocement, Indofood, Indosmart, Sinarindo, dan Sinarindo. Aset pemilik Indocement berada di berbagai negara yang bergerak di bidang konstruksi seperti Australia, Denmark, Jepang, perantara, dan lain-lain. Aset pemilik Indofood berada di berbagai negara yang bergerak di bidang pangan seperti Amerika Serikat, Belanda, dan lain-lain. Aset pemilik Indosmart berada di berbagai negara yang bergerak di bidang teknologi informasi seperti Amerika Serikat, Belanda, dan lain-lain. Aset pemilik Sinarindo berada di berbagai negara yang bergerak di bidang jasa seperti Amerika Serikat, Belanda, dan lain-lain.

## Syarwan Buka Kongres PDI Soerjadi Hari Ini

JAKARTA (Media): Mendagri Syarwan Hamid hari ini mewakili Presiden BJ Habibie membuka Kongres V PDI di Palu. "Saya akan hadir untuk mewakili Presiden membaikan pidato tertulis," kata Syarwan menjawab pertanyaan wartawan di Semarang, kemarin. Pagi ini Syarwan berangkat dari Semarang menuju Palu untuk membuka kongres yang dimulai pukul 11.00 waktu setempat. Ia berharap kongres mampu menyatukan kubu Soerjadi dan Megawati. "Saya sangat mengkhawatirkan masalah mereka dapat diselesaikan di Palu. Kalau konflik itu dibawa terus saya tidak tahu PDI akan menjadi apa, tentu gambar PDI akan ada berapa," katanya.

Ketika ditanyakan mengapa pemerintah tidak bersedia mengakui kepemimpinan DPP PDI Megawati yang sah dan konstitusional, Mendagri menegaskan, "pemerintah itu tidak akan menyelesaikan persoalan."

Kongres hari ini berlangsung dalam situasi menegakan. Kendati 1.300 personel aparat keamanan distagakan, massa pendukung Megawati masih berupaya untuk menggagalkan kongres. Kemudian, ribuan pendukung Megawati melakukan *long march* menuju tempat kongres di Wisma Haji Palu, menuntut agar Soerjadi membatalkan kongres.

Long march dimulai dari tempat dihirup oleh para pendukung perintis dari Polres Donggala ketika akan memasuki pasar perbatasan di Jl Hasanudin dan Gedah Mbak, tetapi tidak sampai sampai bentakan dengan aparat keamanan.

Mereka menggalang spanduk bertuliskan "Bubarkan Kongres traktat PDI Soerjadi, Wisma Haji bukan tempat bagi petaka-petaka Soerjadi bertubuh".

Pendukung Megawati dibentarkan memasuki tempat di Wisma Haji Palu pukul 12.30 Wita. Operasi pengaman yang berkecamuk dan



**PANTANG MENYERAH LANJUTKAN KULIAH**

**BBA • MBA • DBA Hanya Rp 2 juta**

JIPAT

Alamat: Jl. Veteran No. 25, Jakarta  
Telp: 5388334 Fax: 5383378  
Email: jipat@jipat.net.id

Alamat: Jl. Veteran International No. 2  
Telp: 3198841-3 Fax: 3198843  
Website: www.jipat.net.id